

Program Keluarga Harapan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar

Muhammad Alwi^{1*}  Marwati Sulni² 

¹ Dosen Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, Jl. Agatis Balandai Kota Palopo, Sulawesi Selatan

² Pendamping Program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, Jl. H. Andi Depu, Sulawesi Barat

* Korespondensi: muhammad_alwi@iainpalopo.ac.id; Tel: +6285210956398

Diterima: 07 Januari 2021; Disetujui: 25 Oktober 2021 ; Diterbitkan: 31 Januari 2022

Abstrak: Artikel ini mengupas upaya pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan bulan September sampai November 2020 di enam desa, tiga wilayah kecamatan Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif yakni reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 menghantam sektor perekonomian yang berimplikasi pada pendapatan dan daya beli masyarakat kurang mampu, sehingga pemerintah melalui Program Keluarga Harapan memberikan bantuan sosial agar masyarakat kurang mampu mendapatkan perlindungan sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga yang terimplementasi dengan baik di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam implementasi bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan dimasa pandemi Covid-19, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar mengalami banyak skema perubahan penyesuaian bantuan sosial sebagai upaya pemenuhan masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, harapan besar pemerintah melalui bantuan sosial, masyarakat kurang mampu bisa memenuhi kebutuhan keluarga di masa pandemi Covid-19, tidak hanya kemudian bersifat konsumtif dan bergantung pada bantuan pemerintah.

Kata kunci: Covid-19, Pemenuhan Kebutuhan, PKH

Abstrak: This article is peeling efforts to meet the needs of the family beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) in the pandemic Covid-19 in Polewali Mandar. This study uses a type a qualitative descriptive approach. The research was conducted in September to November 2020 in the six villages, the three districts in Polewali Mandar. The research location is determined by purposive then the techniques of data collection are done by interview, observation and documentation. The Data were analysed qualitatively, namely data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the impact of the pandemic Covid-19 hit sectors of the economy that have implications on the income and purchasing power of the poor, so that the government through the Family Hope Program provides social assistance to people less able to get social protection in an effort to meet the needs of the family are implemented properly in Polewali Mandar. In the implementation of social assistance through the Family Hope Program in the pandemic Covid-19, especially in Polewali Mandar experienced a lot of schemas changes adjustments of social assistance as an effort to fulfil people are less able. Thus, the great hope of the government through the help of social, community less able to meet the needs of the family in the pandemic Covid-19, not only then are consumptive and rely on government assistance.

Keywords: Covid-19, Fulfillment of Needs, PKH

1. Pendahuluan

Dalam situasi Pandemi Covid-19, Indonesia dihadapkan dengan berbagai persoalan, termasuk di dalamnya persoalan ekonomi. Sejatinya, krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia bukanlah yang pertama kali. Pada tahun 1997/1998, inflasi yang melanda Indonesia menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis, khususnya masyarakat yang memiliki upah penghasilan rendah. Tidak hanya itu, nilai tukar rupiah yang tidak stabil berimbas pada krisis keuangan dan perbankan. Selain itu, persoalan tersebut juga menyebabkan krisis sosial dan politik yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia (Silpa Hanoatubun, 2020).

Dampak pandemi Covid-19 berimplikasi negatif terhadap sektor perekonomian domestik yang ada di Indonesia, terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak mempunyai penghasilan dan banyak kesusahan yang diterima dari semua sektor perekonomian, dalam semua bidang juga merasakan dampak dari Covid-19 (Silpa Hanoatubun, 2020).

Penurunan daya beli masyarakat berdampak juga terhadap kinerja perusahaan yang semakin menurun, ancaman terhadap sektor perbankan dan keuangan serta mengancam eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat sangat berpengaruh akibat kurangnya pendapatan atau penghasilan terutama masyarakat yang pekerja informal dan harian. Sehingga sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati dalam mengatur keuangannya yang berakibat kepada berkurangnya permintaan barang konsumsi dan memberikan tekanan pada produsen dan penjual (Julio Ronaldo Togas Lengkong, 2020).

Dengan terus bertambahnya jumlah penderita Covid-19 dalam dua bulan terakhir, data akumulasi sejak 2 Maret-4 Mei 2020 sebanyak 11.192 kasus positif dan 8.452 meninggal, sangat mengkhawatirkan dan menyebabkan kepanikan baik di kalangan pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Sehingga memaksa pemerintah memberlakukan kebijakan *social distancing* yang kemudian diubah menjadi *physical distancing* yang memaksa sebagian besar masyarakat bekerja di rumah (Haryanto, 2020). Sehingga, pada aspek perusahaan khususnya yang bergerak pada sektor perdagangan, transportasi dan pariwisata, mengalami penurunan yang signifikan karena para karyawan tidak bisa bekerja secara efisien dan efektif. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk dengan banyaknya masalah pembayaran hutang dan kredit macet. Banyak kreditur yang meminta kelonggaran dalam pembayaran kredit yang akan berakibat pada eksistensi dunia perbankan dalam memutar uang nasabah. Selain itu banyak proyek-proyek strategis pemerintah yang terancam karena para investor asing yang tidak mau berinvestasi dan bahkan menarik investasinya di Indonesia.

Di antara dampak perekonomian yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 adalah meningkatnya jumlah pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI, hingga 31 Juli 2020, lebih dari 3,5 juta pekerja terdampak Covid-19, di mana 1.132.117 orang pekerja formal yang dirumahkan, 383.645 orang di-PHK, dan sebanyak 630.905 pekerja informal terdampak (Mohammad Teja, 2020).

Dengan banyaknya pekerja yang dirumahkan, baik pekerja informal maupun pekerja yang di-PHK, hal ini akan berpotensi masuk ke dalam garis kemiskinan. Tidak adanya lapangan pekerjaan baru di tengah pandemi Covid-19 membuat dependensi tinggi terhadap bantuan sosial dari pemerintah dan donasi. Kebutuhan ini berskala besar, menimbang banyaknya jumlah pekerja informal dan korban PHK di Indonesia, ditambah rumah tangga yang sudah tergolong miskin dari sebelum pandemi. Otomatis, besaran nominal dan jumlah bantuan sosial yang dibutuhkan pun semakin tinggi, karena menurunnya pendapatan mereka secara drastis. Bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 tidak berfokus pada satu program. Melalui kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah ekonomi makro selama pandemi Covid-19 terbagi dalam 2 jaring pengaman yaitu, Jaring Pengaman Sosial dengan cara penambahan dan dukungan dari pembiayaan APBN yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Subsidi Listrik, dan Subsidi Insentif Perumahan Murah (Lestary J. Barany, Asisten Peneliti, Dewa Ayu Widia, Asisten Peneliti, 2020) dan Jaring

Pengaman Ekonomi dengan cara pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Selain itu untuk meningkatkan perekonomian juga dilakukan berbagai stimulus yaitu Pertama, dikeluarkan, Perppu 1 Tahun 2020. Kedua, dikeluarkan kebijakan perpajakan Ketiga, dikeluarkan Kebijakan di Sektor Keuangan (A. Ika Fahrika dan Juliansyah Roy, 2020).

Kementerian sosial RI juga meluncurkan berbagai program dan stimulus sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap program bantuan sosial di masa pandemi Covid-19. Beberapa program yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin di Indonesia diantaranya program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan untuk keluarga miskin (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (Rastra)) dan program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Winarno, 2020). Namun masyarakat belum banyak mengetahui dan memanfaatkan secara maksimal berbagai program dan bantuan dari pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan sosial (Habibullah, 2017).

Program Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan yang paling populer di masyarakat. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan, program ini sangat membantu kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan. Namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Arif Sufianto di Jawa Tengah. Ditemukan bahwa sasaran program yang masih kurang tepat, di mana masih ditemukan orang yang tidak miskin mendapatkan bantuan dan sebaliknya yang miskin belum mendapat bantuan. Hal ini disebabkan oleh data yang masih belum valid dan penggunaan bantuan Program Keluarga Harapan juga belum optimal sesuai ketentuan (Sufianto, 2020). Sehingga dampak bantuan sosial Program Keluarga Harapan masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok, atau yang disebut sebagai perilaku ekonomi subsisten (Habibullah, Sugiyanto, Anwar Sitepu, Irmayani, Badrun Susantyo, B. Mujiyadi, 2017).

Perencanaan data yang baik dan pendampingan yang berkelanjutan dapat menjadi alternatif untuk mendorong masyarakat dalam perbaikan kehidupan ekonominya. Sinkronisasi data terus dilakukan sebagai upaya untuk mendukung efektivitas penyaluran program bantuan sosial pemerintah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan pemerintah daerah (PEMDA) terus melakukan perbaikan ketepatan status penerima bantuan. Melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data yang dipakai untuk penyaluran bansos secara nasional, Dirjen Dukcapil memadankan data kependudukan miliknya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan penerima bantuan pada DTKS yang diyakini keberadaannya berdasarkan NIK, sehingga penyaluran diyakini dapat tepat sasaran (Nuniek Dewi Pramanik, 2020).

Dalam kajian yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas bansos PKH dapat membantu memenuhi kebutuhan dan menurunkan angka kemiskinan apabila dibandingkan dengan program lain seperti subsidi energi program PKH mampu menurunkan angka kemiskinan di range 5 hingga 7 persen per 100 Triliun Rupiah anggaran yang dikeluarkan (Martha Carolina, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Saragian Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, menunjukkan bahwa bantuan sosial PKH efektif dalam memenuhi kebutuhan karena kondisi ekonomi yang lemah dan akses pendidikan yang tidak memadai bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH, karena Desa tersebut merupakan daerah terpencil (Rina Angraini, 2021). Namun dalam penelitian lain yang dilakukan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa bantuan sosial PKH yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tidak sepenuhnya digunakan untuk tujuan atau prioritas dari bantuan sosial PKH, sehingga tujuan dari bantuan sosial tersebut tidak tercapai. Adanya Keluarga Penerima Manfaat PKH yang sudah terbiasa menerima bantuan dan susah untuk merubah pola pikirnya yang bersifat konsumtif, sehingga tidak ada keinginan untuk mandiri sejahterah. Hal ini menjadi tantangan bagi pendamping sosial PKH (Rahmah Muin, 2020).

Dampak dari pandemi Covid-19 cukup dirasakan oleh masyarakat miskin di Kabupaten Polewali Mandar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Ahmad G, 2020). Bantuan sosial baik dari pemerintah pusat dan daerah sangat diharapkan oleh masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 401.057 rupiah/kapita/bulan, jumlah penduduk miskin sebanyak 68.180 orang dengan persentase sebesar 15,26 persen. Indeks kedalaman kemiskinan yaitu 2,74 persen dan Indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,79 persen. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 442.576 jiwa dan 98.677 rumah tangga. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2020a). berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar jumlah penerima bantuan sosial PKH di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2020 sebanyak 28.348 keluarga atau sebanyak 28,7 persen keluarga di Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial RI.

Berdasarkan uraian di atas, Penelitian ini fokus pada realisasi bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian penelitian ini bermaksud mendeskripsikan kondisi ekonomi dan realisasi upaya pemerintah memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar pada masa pandemi Covid-19.

2. Metode

Secara metodologis, jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di enam desa dari 167 desa/kelurahan, tiga wilayah kecamatan dari 16 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, dengan pertimbangan letak geografis yang berbeda, terpilih enam desa/kelurahan sebagai lokasi penelitian yaitu Kelurahan Darma dan Kelurahan Takatidung berada di Kecamatan Polewali, Desa Lampoko dan Desa Katumbangan berada di Kecamatan Campalagian, serta Desa Mombi dan Desa Pao-pao berada di Kecamatan Alu.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan menggunakan teknik *snowball sampling* (sampel bola salju) dimulai dari orang yang dikenal kemudian berkembang berdasarkan informasi yang didapatkan. Ada sekitar 45 peserta Keluarga Penerima Manfaat PKH yang di wawancarai dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda untuk diambil informasi terkait dengan data ingin didapatkan. Data dan informasi juga di dapatkan dari beberapa pendamping PKH dan pemangku kepentingan yang terkait. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi struktur kualitatif agar memberikan kesempatan kepada peserta Keluarga Penerima Manfaat PKH untuk mengespresikan pandangan dan interpretasi mereka terkait dengan bantuan sosial PKH. Pendekatan ini bisa memberikan interpretasi yang rinci, kontekstual dan mendalam terkait dengan masalah yang diteliti (J. Mason, 2002).

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan (Milles dan Huberman, 1992). Reduksi data dilakukan dengan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dilapangan. Data yang didapatkan diseleksi secara ketat dengan uraian yang singkat. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang sudah tersusun yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah analisis secara mendalam.

3. Hasil

3.1. Gambaran umum Kabupaten Polewali Mandar

Sejarah singkat Kabupaten Polewali Mandar, di mana sebelumnya bernama Kabupaten Mamasa yang secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Polewali Mandar secara resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Kabupaten Polewali Mandar (sering disingkat Polman), adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Polewali yang berjarak 246 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 16 kecamatan, 23 kelurahan, dan 144 desa (Wikipedia, 2008).

Kabupaten Polewali Mandar secara geografis terletak antara 2°40'00"-3°32'00" LU dan 118°40'27"-119°32'27" BT. Batas wilayah Kabupaten Polewali Mandar di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi, di sebelah Selatan berbatasan dengan laut dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene. Luas wilayah Polewali Mandar adalah 2.022,30 km² (Dinas Kominfo SP Polewali Mandar, 2020).

Dari sisi topografi, sebagian besar atau di atas 41 persen dari luas Kabupaten Polewali Mandar memiliki topografi berbukit, di atas 39 persen dari luas kabupaten memiliki topografi bergunung, dan sisanya sekitar 20 persen dari luas kabupaten memiliki topografi datar, dengan kelas lereng dominan antara 5-15 persen dan 15-40 persen (di atas 70% dari luas kabupaten). Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 sebanyak 442.576 jiwa dan 98.677 rumah tangga. Penduduk tersebut tersebar di 16 wilayah Kecamatan terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 217.597 jiwa dan perempuan 224.979 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,23 persen. Dengan luas wilayah sekitar 2.022,30 km², berarti setiap km² ditempati oleh penduduk sebanyak 219 jiwa. Sebaran penduduk menurut kelompok umur tahun 2019 menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (umur 15-64 tahun) sebesar 65,55 persen atau 290.110 jiwa; penduduk usia muda 0-14 tahun sebanyak 128.728 jiwa atau 28,98 persen dan sisanya penduduk usia di atas 65 tahun (Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2020a).

Kecamatan Polewali merupakan ibu kota Kabupaten Polewali Mandar dengan populasi penduduk terbesar, hingga 61.914 jiwa. Populasi terbesar kedua yaitu Campalagian yang mencapai 57.271 jiwa. Populasi dua kecamatan ini mencapai 27 persen populasi penduduk Kabupaten Polewali Mandar. Sebaran jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2012-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, 2012-2018

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alu	12.331	12.388	12.502	12.672	12.824	12.993	13.160
Anre Api	9.622	9.768	9.889	10.014	10.127	10.253	10.376
Bulo	9.067	9.151	9.304	9.418	9.517	9.630	9.746
Balanipa	24.583	24.654	24.809	25.139	25.430	25.763	25.912
Binuang	31.450	31.500	32.104	32.366	32.575	32.823	33.065
Campalagian	53.926	54.125	54.626	55.320	55.935	56.605	57.271
Iimboro	17.272	17.341	17.416	17.604	17.765	17.949	18.133
Luyo	27.795	28.139	28.549	28.960	29.325	29.732	30.133
Mapilli	27.767	27.830	28.199	28.543	28.840	29.175	29.504
Matakali	22.141	22.247	22.533	22.818	23.071	23.354	23.628
Matangnga	5.232	5.303	5.383	5.446	5.498	5.559	5.619
Polewali	57.095	57.569	58.561	59.434	60.222	61.072	61.914
Tapango	22.421	22.586	22.904	23.217	23.495	23.804	24.107

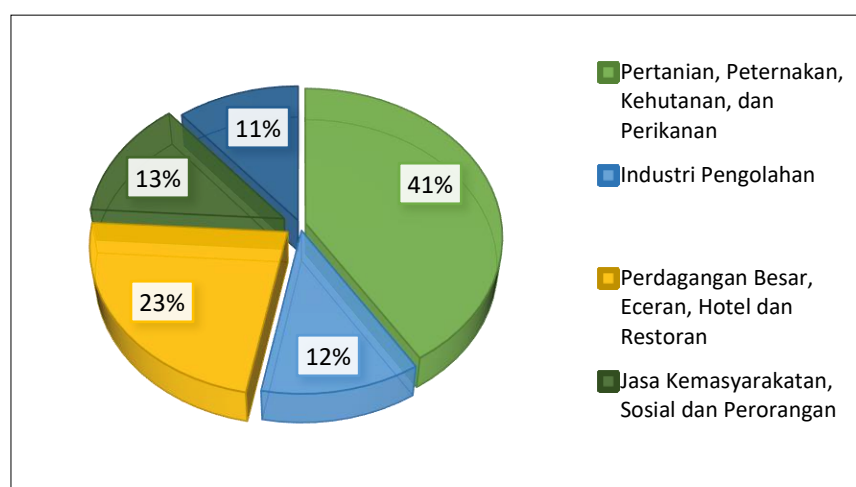
Muhammad Alwi dan Marwati Sulni

Program Keluarga Harapan dan Pemberdayaan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Polewali Mandar

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tinambung	23.153	23.314	23.597	23.867	24.099	24.362	24.622
Tubbi Taramanu	19.067	19.231	19.465	19.747	19.997	20.270	20.543
Wonomulyo	46.726	46.976	47.631	48.228	48.764	49.348	49.929
Total	409.648	412.122	417.472	422.793	427.484	432.692	437.662

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2019.

Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional 2019, sebagian besar penduduk Kabupaten Polewali Mandar bekerja di sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 41 persen (84,8 ribu orang). Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja besar yakni sektor perdagangan besar dan sektor jasa. Sektor perdagangan menyerap tenaga kerja sebesar 23 persen (48,3 ribu orang), sedangkan sektor jasa hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 13 persen (26,3 ribu orang). Pada sektor perdagangan besar, eceran, hotel dan restoran didominasi oleh pekerja perempuan yakni 33,5 persen, sedangkan laki-laki persentase terbesar bekerja di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (49,5 persen). Pada jenis kelamin perempuan sektor tertinggi kedua setelah perdagangan besar, eceran, hotel, restoran yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Hal ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan laki-laki, di mana sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan menjadi sektor dominan yang diminati oleh pekerja laki-laki. Untuk sektor lainnya terdapat perbedaan jumlah persentase laki-laki dengan perempuan. Di sektor industri pengolahan, laki-laki yang bekerja sebesar 7,6 persen sedangkan perempuan lebih besar yakni 19,5 persen. Demikian pula di sektor jasa kemasyarakatan, persentase peran perempuan (16,8 persen) lebih besar dibandingkan dengan laki-laki (9,9 persen). (Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2020b)



Gambar 1. Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2019 (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 2020)

Penduduk Kabupaten Polewali Mandar umumnya beragama Islam, hal ini berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020, bahwa sebanyak 98 persen menganut agama Islam, selebihnya beragama Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan lainnya. Suku dan budaya yang ada di Kabupaten Polewali Mandar juga beragam yakni suku Mandar, Mamasa, Pattae, Bugis, Makassar dan Toraja. Namun sebagian besar penduduk Kabupaten Polewali mandar bersuku mandar karena merupakan suku asli pribumi.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Polewali Mandar, 2020

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	lainnya
Alu	13.160	-	-	-	-	-
Anre Api	10.349	135	318	-	-	-
Bulo	9.901	-	-	-	-	-
Balanipa	26.624	3	7	-	-	-
Binuang	34.166	811	102	-	-	-
Campalagian	60.413	-	-	-	-	-
Limboro	18.074	-	-	-	-	-
Luyo	32.709	1	-	-	-	-
Mapilli	28.799	-	-	-	6	2
Matakali	23.107	745	-	-	-	-
Matangnga	3.901	-	-	-	-	-
Polewali	83.893	3.779	417	80	11	-
Tapango	25.243	245	249	48	-	-
Tinambung	22.672	3	-	-	-	-
Tubbi Taramanu	22.467	-	-	-	-	-
Wonomulyo	45.193	415	71	-	-	-
Total	460.671	6.137	1.164	128	17	2

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar

Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 401.057 rupiah/kapita/bulan, jumlah penduduk miskin sebanyak 68,18 ribu orang dengan persentase sebesar 15,26 persen. Indeks kedalaman kemiskinan yaitu 2,74 persen dan Indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,79 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2020a). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami penurunan setiap tahunnya hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

Tabel 3. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Polewali Mandar 2014-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2014	293.073	75,68	17,79
2015	305.462	77,90	18,22
2016	337.138	73,04	17,06
2017	351.856	69,25	16,05
2018	366.355	69,68	15,97
2019	376.827	68,86	15,60
2020	401.057	68,18	15,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar 2020

3.2. Kondisi Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang terdapat di kabupaten lain di Sulawesi Barat. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2020 sebanyak 28.348 keluarga atau sebanyak 28,7 persen keluarga di Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial RI. Jumlah

Muhammad Alwi dan Marwati Sulni

Program Keluarga Harapan dan Pemberdayaan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Polewali Mandar

tersebut tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten. Berikut adalah jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di setiap wilayah kecamatan.

Tabel 4. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Wilayah Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat
Alu	1.235
Anre Api	680
Bulo	992
Balanipa	2.265
Binuang	2.165
Campalagian	4.004
limboro	1.535
Luyo	2.804
Mapilli	1.798
Matakali	1.299
Matangnga	550
Polewali	1.931
Tapango	1.531
Tinambung	1.537
Tubbi Taramanu	2.816
Wonomulyo	1.206

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini dilakukan di enam desa/kelurahan tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Polewali, Kecamatan Campalagian dan Kecamatan Alu. Hasil wawancara dengan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan diperoleh informasi, keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan di masa pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana yang disampaikan penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Mombi Kecamatan Alu sebagai berikut:

Iya saya merasakan dampak dari pandemi Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan keluarga, secara ekonomi saya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, karena suami saya yang bekerja sebagai tukang ojek mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi Covid-19 (BHR, 12 Okto. 2020).

Keterangan serupa serupa disampaikan penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian, sebagai berikut:

Suami saya bekerja sebagai petani, di mana hasil pertaniannya saya sendiri yang menjualnya ke pasar, tetapi dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan harga mengalami penurunan karena permintaan di pasar menurun, sehingga pendapatan keluarga menurun (STA, 15 Okto. 2020).

Informasi yang sama juga disampaikan penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kelurahan Darma Kecamatan Polewali, sebagai berikut:

Perekonomian keluarga saya di masa pandemi Covid-19 mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini disebabkan saya sebagai tulang punggung dalam keluarga bekerja sebagai pedagang di pasar sentral Pekkabata Kecamatan Polewali, dimana omset penjualan turun drastis di masa pandemi Covid-19, sehingga keuntungan juga mengalami penurunan (KSM, 20 Okto. 2020).

Informasi dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan menggambarkan bahwa kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali

Mandar mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena sebagian besar keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar pekerjaan utamanya adalah pekerja harian dan petani yang penghasilannya tidak menentu. Sehingga sangat perlu perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan sosial sebagai stimulus dalam memenuhi kebutuhan mereka.

3.3. Upaya pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di masa pandemi covid-19

Penelitian ini memotret kontribusi Program Keluarga Harapan dalam memberikan jaminan perlindungan sosial bagi keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini dilakukan sejak periode September hingga November 2020.

Di masa pandemi Covid-19, Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan merubah skema tahapan penyaluran bantuan sosial beras yang sebelumnya dilaksanakan per triwulan menjadi setiap bulan. Inisiatif ini dilakukan untuk menopang perekonomian dan kebutuhan asupan gizi keluarga pra sejahtera di tengah dampak Covid-19 dan kebijakan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah guna mencegah penyebaran Covid-19, sehingga mengalami kesulitan untuk bekerja diluar rumah dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Di Kabupaten Polewali Mandar, bantuan khusus untuk menangani dampak pandemi Covid-19 dan mengurangi beban pengeluaran diwujudkan dalam bentuk bantuan kebutuhan dapur, seperti beras, telur, daging ayam, abon-abon, dan mie instan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Selain itu, Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Polewali Mandar juga mendapatkan Bantuan Sosial Beras (BSB). Terhitung sejak bulan Agustus hingga Oktober 2020, program Program Keluarga Harapan telah menyalurkan bantuan sosial beras sebanyak 15 kg per keluarga penerima manfaat. Kontribusi Program Keluarga Harapan sangat berperan dalam menopang pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat, terlebih di masa pandemi Covid-19. Hal ini dikemukakan oleh keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali sebagai berikut:

Saya sangat merasakan eksistensi Program Keluarga Harapan sebagai instrument dalam upaya pemenuhan kebutuhan khususnya di masa pandemi Covid-19. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga merupakan salah satu program bantuan yang disalurkan setiap bulan kepada anggota keluarga penerima manfaat. Program tersebut dapat memenuhi kebutuhan saya dan keluarga dan memungkinkan saya untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan bulanan dan penghasilan lainnya untuk ditabung sebagai persiapan masa depan dan juga bisa dijadikan sebagai modal usaha (LST, 28 Okto. 2020).

Dalam hal ini, Program Keluarga Harapan sebagai instrumen pemerintah melalui Kementerian Sosial menemukan relevansinya dalam mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Selain itu, instrument tersebut juga menjadi salah satu penanda kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat kurang mampu, khususnya kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

Program Keluarga Harapan merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini, masyarakat kurang mampu di masa pandemi Covid-19 mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga pemerintah memberikan bantuan khusus penanganan Covid-19 untuk memenuhi kebutuhannya. Di kabupaten Polewali Mandar penyaluran bantuan khusus penanganan Covid-19 sudah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Harapan kami dengan bantuan sosial Covid-19 dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak kemudian menyebabkan keluarga

Muhammad Alwi dan Marwati Sulni

Program Keluarga Harapan dan Pemberdayaan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Polewali Mandar

penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjadi konsumtif dan tergantung kepada bantuan pemerintah (YSD, 11 Nov. 2020).

Bayaknya bantuan sosial yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial khususnya kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di masa pandemi Covid-19. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak dalam pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga bantuan sosial dampak covid-19 bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dapat menopang kehidupan di masa pandemi Covid-19. Salah satu keterangan dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, menuturkan sebagai berikut:

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan sangat membantu perekonomian keluarga miskin, terlebih dimasa krisis ekonomi akibat pandemi covid-19. Bantuan Sosial berupa BPNT khusus covid-19, penyaluran bantuan yang disalurkan tiap bulan dan Bantuan Sosial Beras (BSB) yang diterima Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sangat dirasakan manfaatnya, karena pemenuhan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi (MRL, 16 Nov. 2020).

Implementasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dimasa pandemi covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar sudah terealisasi dengan baik. Keluarga penerima Program Keluarga Harapan setiap bulan melakukan penyaluran bantuan di ATM (*Automated Teller Machine*) untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun keluarga penerima manfaat yang mengalami masalah seperti Kartu ATM atau KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang terblokir dan tidak terbaca di mesin ATM langsung ditangani oleh Pendamping untuk dikoordinasikan dengan pihak bank penyalur. Begitu juga dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersalurkan setiap bulan, Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan menerima Bantuan Pangan Non Tunai berupa beras, daging ayam, sayuran dan telur selama masa covid-19. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut:

Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah 28.348 Keluarga Penerima Manfaat yang tersebar di 16 Kecamatan. Bantuan sosial beras sebanyak 15 kg setiap bulan selama periode Agustus-Oktober 2020 sudah tersalurkan dengan baik di beberapa Kecamatan, hanya ada beberapa Kecamatan yang belum tersalur karena masuk dalam kategori *remote area* atau masuk dalam kategori daerah sulit terjangkau tetapi sementara diusahakan untuk disalurkan. Penyaluran bantuan sosial beras Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar tersalurkan dengan baik karena kerja sama atau koordinasi yang baik dari semua pihak. Harapannya dengan adanya bantuan sosial Program Keluarga Harapan khusus Covid-19 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan bisa membantu memenuhi kebutuhannya. (RHT, 19 Nov. 2020).



(a)



(b)

Gambar 2. Realisasi penyaluran bantuan sosial beras (a) di Kelurahan Darma Kecamatan Polewali (Sumber : dok Peneliti); (b) Realisasi penyaluran Bantuan Sosial Beras di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian (Sumber : dok Peneliti)

Dengan terealisasinya bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar dapat membantu masyarakat kurang mampu khususnya Keluarga Penerima manfaat Program Keluarga Harapan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat di masa pandemi covid-19. Menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan di masa pandemi Covid-19.

4. Pembahasan

Eksistensi Program Keluarga Harapan sebagai instrumen untuk merealisasikan program Kementerian Sosial terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan memberikan efek kesejahteraan sosial kepada masyarakat pra sejahtera. Program Keluarga Harapan merupakan program Kementerian Sosial yang mendapatkan anggaran yang cukup besar. Dalam hal ini, anggaran tersebut diarahkan kepada keluarga pra sejahtera sebagai program bantuan sosial bersyarat, dengan merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat.

Program Keluarga Harapan pertama kali direalisasikan di Indonesia pada tahun 2007. Dalam perkembangannya, efektifitas program tersebut berhasil menekan angka kemiskinan dan menopang kemandirian keluarga penerima manfaat agar dapat meraih kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks dunia internasional, program perlindungan sosial ini dikenal dengan istilah *conditional cash transfers* (CCT). (Sosial, 2020).

Di antara komponen bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat kurang mampu mencakup kesehatan dan pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Program bantuan sosial Program Keluarga Harapan juga memberi stimulus untuk merubah perilaku masyarakat terkait dengan pemanfaatan layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan. Kendati penurunan angka kemiskinan tidak terlalu signifikan, tetapi member *impact* terhadap penurunan angka kemiskinan. Dalam perkembangannya, Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program yang memberikan jaminan dan perlindungan sosial sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan khususnya di masa pandemi Covid-19.

Terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 sangat rentan dan dirasakan khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga diperlukan implementasi kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial agar masyarakat miskin dapat mempertahankan kehidupannya. Melalui Program Keluarga Harapan bantuan sosial khusus penanganan Covid-19 di salurkan untuk meminimalisir dampak buruk ekonomi masyarakat miskin. Oleh karena itu, implementasi program perlindungan sosial yang di canangkan oleh pemerintah harus secara efisien dan efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terdampak.

Polewali Mandar merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Sulawesi barat yang memiliki jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan terbanyak apabila di bandingkan dengan daerah lain jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 28.348 Keluarga Penerima Manfaat pada Tahun 2020. Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar merasakan dampak dari pandemi Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Khususnya bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang bekerja harian dan petani. Sehingga bantuan sosial dari pemerintah dalam hal ini Kementerian sosial sangat dirasakan manfaatnya.

Dalam hal ini, pemerintah (Kementerian Sosial RI) konsen dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan merubah skema bantuan sosial dan memberikan bantuan stimulan kepada keluarga kurang mampu khususnya keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan sebagai upaya dalam perlindungan dan jaminan sosial. Penyaluran bantuan sosial khusus penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar terealisasi dengan baik. Dengan tersalurnya bantuan sosial kepada

Muhammad Alwi dan Marwati Sulni

Program Keluarga Harapan dan Pemberdayaan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Polewali Mandar

keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan diharapkan bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan menjaga daya beli masyarakat.

4 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Polewali Mandar mengalami dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga pemerintah menyesuaikan kebijakan bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19. Bantuan sosial khusus penanganan Covid-19 yang di salurkan melalui Program Keluarga Harapan diimplementasikan dengan merubah skema bantuan sosial dan menambah bantuan sosial sembako berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya. Agar kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial yang lain. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di masa pandemi Covid-19. Realisasi dari penyaluran bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kabupaten Polewali Mandar berjalan dengan efektif sampai ke pelosok daerah.

5 Saran

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari penyaluran bantuan sosial penanganan Covid-19 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu di masa pandemi Covid-19, perlu sinkronisasi data dan kerja sama stakeholder yang terkait agar bantuan sosial penanganan Covid-19 dapat tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Diharapkan dari realisasi bantuan sosial tersebut tidak hanya bantuan yang sifatnya konsumtif, akan tetapi bisa memberikan efek yang jauh untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat kurang mampu untuk bisa memperbaiki kondisi ekonominya dikemudian hari. Sehingga perlu peran dan upaya pemerintah dan pendamping Program Keluarga Harapan untuk terus memberikan edukasi kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Ucapan terimakasih: Kepada Koordinator Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Koordinator Kabupaten Polewali Mandar, dan Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Polewali Mandar atas segala bantuan dan dukungan selama proses penelitian ini. Secara khusus, kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- A. Ika Fahrika dan Juliansyah Roy. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, 16, 206–213.
- Ahmad G. (2020). *Dampak Ekonomi Corona, Kakek Penjual Sapu di Polman Utang Beras Tetangga*. Sulbar Kita.
https://sulbarkita.com/dampak_ekonomi_corona_kakek_penjual_sapu_di_polman_utang_beras_tetangga_berita905.html
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. (2020a). *Statistik Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2020*. Auliyah Polewali.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. (2020b). *Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar.
- Dinas Kominfo SP Polewali Mandar. (2020). *Kondisi Geografis*.
<https://polmankab.go.id/Polman/Kondisigeografis>.
- Habibullah, Sugiyanto, Anwar Sitepu, Irmayani, Badrun Susantyo, B.Mujiyadi, T. N. (2017). *Pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI - Jakarta.
- Habibullah. (2017). *Pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 6.

- <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/713>
- Haryanto. (2020). 151 The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2 – Juni 2020 Dampak Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4, 151–165.
- J. Mason. (2002). *Qualitative Researching*. London: Sage.
- Julio Ronaldo Togas Lengkong, T. M. T. dan D. D. S. M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja UKM Beebeebkess Collection di Airmaddi Kabupaten Minahasa. *Unstrat*, 42–47.
- Lestary J. Barany, Asisten Peneliti, Dewa Ayu Widia, Asisten Peneliti, Y. R. D. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran? *CSIS Commentaries*.
- Martha Carolina, M. S. A. (2020). Tantangan Bantuan Sosial sebagai bagian Extraordinary Policy Responses dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI*.
- Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mohammad Teja. (2020). Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19. *Info Singkat*, 12.
- Nuniek Dewi Pramanik. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01, 113–120.
- Rahmah Muin, R. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 5, 14–32.
- Rina Angraini, A. K. M. dan B. I. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera. *ICOR: Journal of Regional Economics*, 2.
- Silpa Hanoatubun. (2020). Dampak Covid – 19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2, 146–153.
- Sosial, K. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2020*. Kemensos RI.
- Sufianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(PKH, Kemiskinan, Jawa Tengah). <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>
- Wikipedia. (2008). *Kabupaten Polewali Mandar*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Polewali_Mandar
- Winarno, I. H. dan E. (2020). Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 9.

